

**STATE OF THE ART DARI DIGITAL GOVERNANCE  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE  
MELALUI ANALISIS VOSVIEWER DAN SYSTEMATIC MAPPING  
STUDIES (SMS)**

**Agus Taryana<sup>1</sup>, Imam Suwandi<sup>2</sup>, Yayan Nuryanto<sup>3</sup>, Teguh Sandjaya<sup>4</sup>, Rizki Ananda  
Ramadhan<sup>5</sup>**

<sup>1,3</sup> Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
<sup>2,4,5</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
*e-mail*: agus.taryana@unpad.ac.id.

**Submitted: 30-12-2022; Accepted: 15-01-2023; Published : 16-01-2023**

**ABSTRACT**

Artikel ini bertujuan untuk memetakan *Digital Governance* yang berkaitan *Good Governance* dengan menelusuri hasil studi yang pernah ada berdasarkan pemetaan bibliometrik dan pemetaan sistematis terutama pada fokus penelitian, subjek penelitian dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode VOSViewer dan *systematic mapping studies (SMS)*. Strategi pemetaan dilakukan dengan menelusuri 3 database jurnal elektronik yaitu pada Scopus, Emerald dan Sage journals Publication. Terdapat 360 artikel yang dipetakan VOSViewer dan sebanyak 598 artikel dipetakan dan setelah dilakukan *screening* berhasil didapatkan 31 artikel. Temuan pada pemetaan VOSViewer dan SMS ini akan dapat membantu peneliti-peneliti lain untuk merencanakan penelitian lebih lanjut, karena penelitian ini berpotensi untuk menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masih ada beberapa kajian penelitian yang dapat berpotensi menjadi *novelty* dan memberikan kontribusi baru bagi penelitian *Digital Governance* dan *Good Governance*. Dari hasil pemetaan ditemukan bahwa ada penelitian yang menghubungkan secara langsung antara *Digital Governance* dan *Good Governance* masih belum banyak. Begitupun juga dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan. Metode *mix method* dan *case study* masih sedikit dipakai. Selain itu ada celah pada jenis penelitian *evaluation research* dengan metode penelitian kualitatif masih belum ada peneliti yang melakukan. Hal ini merupakan *research gap* dan berpeluang menjadi *novelty* dalam sebuah penelitian.

**Kata Kunci :** *Digital Governance, Good Governance, Systematic Mapping Studies, VOSViewer*

**ABSTRACT**

*The purpose of this article is to mapping the concept Digital Governance related to Good Governance by tracing the results of existing studies based on bibliometric mapping and systematic mapping, especially on research focus, research subjects and types of research. This study uses the VOSViewer method and systematic mapping studies (SMS). The mapping strategy was carried out by tracing 3 databases of electronic journals namely Scopus, Emerald and Sage journals Publications. There were 360 articles mapped by VOSViewer and as many as 598 articles were mapped and after screening, 31 articles were obtained. The findings on the VOSViewer and SMS mapping able to he researchers to plan further research, because this research has the potential to find a research gap. The results of this study found that there are still several research studies that have the potential to become novelties and make new contributions to Digital Governance and Good Governance research. From the results of the mapping researcher's founds that there were not much research directly linking Digital Governance and Good Governance. Likewise with the type and method of research used. Mix method and case study methods are still rarely used. In*

**State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance  
Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS)  
(Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)**

---

*addition, there is a gap in the type of do evaluation research with qualitative research methods, but there are still no researchers who have conducted it. This is a research gap and has the opportunity to become novelty in a study.*

**Key Words:** *Digital Govrnance, Good Governance, Systemic Mapping Studies, VOSViewer*

## **PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi berkembang dengan pesat, kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku atau pembuat kebijakan di sector publik untuk menyelenggarakan birokrasi pemerintahan dengan bantuan teknologi yang sudah semakin canggih serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Perkembangan teknologi dapat membantu pemerintah melakukan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat. Dalam pemerintahan pelayanan secara elektronik yang merupakan ide gagasan yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang dapat disebut *E-Government* (Gauld, 2006). Pentingnya *E-Government* didasari atas upaya sebuah negara dalam melayani masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang transparan, dengan terciptanya pemerintahan yang transparan ini diharapkan dapat terjadi proses demokratisasi dan transparansi dalam hal administrasi (Ismail et al., 2020). Hal ini dapat bermanfaat untuk meminimalisir konflik serta penyelewengan terhadap kebijakan pemerintah karena dengan adanya *E-Government* siapa saja termasuk masyarakat dapat ikut turut serta mengawasi dan memantau bagaimana proses administratif pemerintahan berjalan (Ismail et al., 2020). Pada konteks pembangunan nasional, penerapan *E-Government* dapat membuka peluang pemerintah untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui *re-inventing* guna membangun aliansiyang lebih erat dengan masyarakat. Beberapa manfaat yang didapatkan dari penggunaan *E-Government* bagi masyarakat maupun pemerintah dalam bidang pelayanan yaitu terbukanya jaringan informasi yang luas serta merata dan pelayanan fleksibel yang bisa di akses kapan saja dan dimana saja. Masyarakat tidak perlu datang dan mengantri di loket atau dinas terkait jika ingin melakukan pelayanan, tentu saja hal ini dapat menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat dibanding dengan pelayanan manual

yang biasadilakukan. Pemerintah juga dapat dengan tanggap melayani atau berkomunikasi dengan masyarakat secara elektronik sehingga informasi yang disampaikan akan lebih cepat diterima.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) merupakan langkah awal pemerintah Indonesia menuju perbaikan ke arah *Good Governance* yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *Good Governance*. Kemudian didukung dengan dikeluarkanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*. Hal ini merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk menciptakan pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien. (Bimasakti, 2017). Untuk menguatkan dalam rangka *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di berbagai Sektor Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan instruksi tepat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. Dalam perspektif yang baru, *e-government* atau *digital goverment* merupakan bagian-bagian dari konsep *Digital Governance* dimana struktur dari praktik sector public atau kebijakan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan adanya interaksi ke setiap *stakeholder* dan unsur dari pemerintahan itu sendiri (Erkut, 2020). Penerapan *E-Government* tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), dengan demikian penerapan *Digital Governance* mungkin dapat berpotensi untuk menguatkan *Good Governance* (McBride, 2019). Untuk menciptakan

strategi-strategi yang terbaru tentu harus bertransformasi dalam birokrasi melalui setiap kota karena kota memiliki keunggulan mulai dari kuantitas penduduk, infrastruktur, tatanan masyarakat, dan teknologi (Rohayatin, 2017). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan teknologi akan menjadi jawaban dalam melakukan pelayanan publik untuk memperoleh informasi, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran yang sangat penting. (Bewa Dangu Wole & Anisa Purwaningsih, 2021).

Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk ini untuk memetakan penelitian-penelitian mengenai *governance*, khususnya *Digital Governance* dengan memasukan objek penelitian dengan kata kunci “*Good Governance*” untuk melihat keterkaitan secara sistematis antara kedua subjek penelitian tersebut, selain itu pula peneliti ingin memetakan subjek apa saja yang banyak diteliti dan subjek mana saja yang bisa mengisi kekosongan dan kebaruan pada penelitian Digital Governance dengan menggunakan metode pemetaan bibliometric VOSviewer dan metode *systematic mapping studies* (SMS). Metode analisis VOSviewer digunakan dengan tujuan membuat jaringan bibliometrik berdasarkan data yang diunduh dari database bibliografi Scopus. Informasi-informasi dalam yang ditampilkan VOSViewer dapat menjadi dasar untuk menganalisa dari ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam penelitian ini (Perianes-Rodriguez et al., 2016). Peneliti menggunakan database scopus untuk selanjutnya di petakan dalam VOSViewer. Dengan *search string* “*Digital Governance*” didapatkan 360 artikel yang selanjutnya dipetakan menjadi kedalam tiga pemetaan yaitu *network visualization*, *overlay visualization* dan *density visualization*. Untuk memperkuat pemetaan mengenai *Digital Governance*, selanjutnya studi tentang *Digital Governance* dipetakan kembali menggunakan metode *systematic mapping studies* (SMS). Metode SMS ini dilakukan sebagai sebuah proses pemilihan studi multi-fase (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018) dengan memakai literatur yang telah di publikasikan di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Metode tersebut dapat dilakukan dengan cara membedakan atau menghubungkan pustaka *Digital Governance*, membuat generalisasi, serta membuat arahan baru untuk penelitian selanjutnya (Purnomo et al., 2020). Peneliti menyeleksi 598 artikel dengan menggunakan

*search string* menggunakan operator boolean dari 3 database jurnal diantaranya Scopus, Emerald Insight, dan Sage journals Publication. Berdasarkan analisis proses ekstraksi data tersebut, penelitian ini membahas tren dan pendekatan utama dan menyajikan kendala yang teridentifikasi. Bagi para peneliti, SMS dapat memberikan sebuah gambaran secara umum melalui pengujian berbasis data melalui pendekatan secara empiris dimana pendekatan tersebut teridentifikasi secara sistematis (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018). SMS dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu subjek. objek, metode dan variasi-variasi lain dari sebuah penelitian, peneliti dari akademisi dan praktisi dapat menggunakan metode ini dapat digunakan sebagai awal apabila akan melakukan sebuah penelitian lanjutan (Fauzi et al., 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

#### 2.1 E-Government

Istilah *E-Government* lahir pada tahun 1990-an, sama seperti istilah *e-Commerce*, istilah *e-Government* lahir dari dari maraknya penggunaan internet, hal tersebut tidak terbatas pada penggunaan Internet atau sistem yang dapat diakses publik yang dapat digunakan langsung oleh oleh warga negara sipil, E-Government dimulai sebagai bidang praktisi, pada dasarnya mempertemukan para praktisi yang berjuang untuk memenuhi tantangan baru dari media Internet dengan menerapkan sistem baru secara kreatif (Grönlund & Horan, 2005). *E-government* dapat didefinisikan sebagai teknologi informasi dan komunikasi khususnya, penggunaan teknologi internet serta aktivitas layanan publik berbasis web dimana koordinasi dan pengawasan eksplisit oleh pemerintah dalam sektor publik dan pengembangan kebijakan (Gauld, 2006).

*E-Government* memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi korupsi dan meningkatkan pendapatan dan/atau mengurangi biaya (Ismail et al., 2020). Hubungan yang jelas dapat ditemukan antara *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa e-government telah terbukti mengurangi korupsi dan meningkatkan pelayanan publik

(Afriana et al., 2020). Erkut (2020) menuturkan bahwa dalam sudut-sudut pandang yang baru, *E-Government* atau *Digital Government* merupakan bagian-bagian dari konsep *Digital Governance* dimana struktur dari praktik sector public atau kebijakan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan adanya interaksi ke setiap *stakeholder* dan menerapkan, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, dan efektifitas

## **2.2 Digital Governance**

Implementasi *Digital Government* bukan hanya tentang tata Kelola pemerintahan yang terkomputerisasi. Berbeda dengan komputersasi sederhana di masa lalu, implementasi *Digital Government* adalah proses yang kompleks yang mendorong transformasi pemerintahan secara keseluruhan. untuk berhasil menerapkan tata kelola digital dari perspektif yang sangat politis (Chung et al., 2022). Algazo et al. (2021) mendefinisikan *Digital Governance* sebagai suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merangkai tanggung jawab, peran, dan otoritas pengambilan keputusan organisasi dengan media digital, termasuk didalamnya pengelolaan website ataupun internet.

Ada sebuah keterkaitan antara *digital Government* dan *Digital Governance*. *Digital Governance* atau *E-Governance*, pada sudut pandang yang lain, berfokus pada keterlibatan publik dan pada posisinya masing-masing (Gao & Lee, 2017). *Digital Governance* mempunyai ciri pada pemanfaatan teknologi informasi dalam operasi kebijakan pada sector publik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya, individu dan organisasi (Twizeyimana & Andersson, 2019). *Digital Governcance* atau *E-Government* merupakan proses interaksi antara pemerintah, masyarakat dan kembalikan kepada pemerintah maupun stakeholder lainnya dengan menerapkan sarana elektronik untuk mempermudah dan meningkatkan tata Kelola di bidang politik, bidang pemerintahan maupun bisnis (Choi & Chandler, 2020). Secara singkat (Kettl, 2015) menggambarkan “Governance” sebagai sebuah cara bagaimana pengambil kebijakan public atau pemerintah dapat menghubungkan politik, sosial, dan administrasi secara lebih luas

## **2.3 Good Governance**

*Governance*, menurut masyarakat awam seringkali diterjemahkan menjadi tata pemerintahan. Dari etimologinya, *governance* berarti memerintah-menguasai-mengelola (Botchway, 2001). *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* bisa disebut juga rangkaian dari berbagai proses interaksi sosial dan politik yang saling berhubungan antara pengambil kebijakan dan msyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum (Solihah et al., 2017). Lebih lanjut Solihah et. Al. (2017) menegaskan bahwa arti kata *good* didalam *Good Governance* meliputi nilai-nilai yang dapat meningkatkan keinginan dan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan kemandirian dan berkeadilan dengan berdasarkan pada aspek fungsional penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, dan menciptakan sebuah rangkaian interaksi sosial dan politik yang berkaitan dengan kepentingan public serta intervensi terhadap kepentingan tersebut dari pemerintah.

UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan dan kesempatan aktivitas swasta yang produktif (Rahim, 2019). World Bank mendefinisikan *Good Governance* menjadi dua bagian. Pertama, *Good Governance* merujuk pada sistem politik suatu organisasi, lembaga atau pemerintah untuk membentuk mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang kuat. kekuatan politik menggambarkan pendekatan sistematis reformasi untuk pembangunan berkelanjutan, menempatkan posisi reformasi nasional untuk integritas nasional dalam pembangunan sosial, ekonomi. Kedua, *Good Governance* harus dapat menghasilkan sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan manusia. Dengan mekanisme yang dirancang untuk menciptakan suasana progresif sosial bagi pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat (Rahim, 2019). Dalam penelitiannya

mengenai konsep *Good Governance* dengan *literature review* Rahim (2019) menyimpulkan bahwa Good Governance merupakan sumber dinamis yang memberikan manfaat bagi sebuah organisasi pemerintahan yang didalam system politik apapun semua tingkat akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, praktik bebas korupsi dan mekanisme pembedaan “rule of law” dapat meningkat serta menghubungkan pemerintah dengan masyarakat secara lebih dekat untuk mencapai tujuan yang sama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian memakai metode penelitian secara kualitatif dengan dua tahap, diantaranya Metode dalam penelitian menggunakan 2 tahap pemetaan sistematis diantaranya menggunakan aplikasi VOSViewer. Metode analisis VOSViewer merupakan pendekatan bibliometrik untuk memvisualisasikan, dan mengeksplor peta pengetahuan secara bibliometric (He et al., 2017). Selanjutnya akan di petakan kembali menggunakan metode SMS (*Systematic Mapping Studies*). Metode *systematic mapping study* (SMS) digunakan untuk meringkas dan mengidentifikasi bukti sebuah topik atau subjek penelitian, selain itu SMS dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian saat ini dan memberikan rekomendasi penelitian di masa depan, serta dapat memberikan justifikasi dan memperkuat kebaruan dari suatu (Kitchenham et al., 2010). Selain itu SMS dapat digunakan sebagai proses identifikasi, evaluasi dan penafsiran semua sumber-sumber literatur secara relevan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditentukan (Petersen et al., 2015). Studi pemetaan sistematis (juga disebut *scooping study*) adalah praktik yang didasarkan pada penelitian berbasis bukti (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018). Tujuan dari pemetaan secara sistematis dengan menggunakan VOSViewer dan SMS bukan untuk menganalisis artikel-artikel yang diseleksi secara terperinci tetapi lebih, menggambarkan pemetaan secara kasar dari penelitian yang relevan ke dalam klasifikasi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan penelitian (Suwandi et al., 2021).

Pemetaan sistematis dapat juga digunakan untuk memetakan jenis-jenis penelitian terdahulu sehingga dapat membetikan penjelasan penelitian pada level yang lebih baik serta memetakan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian secara rinci (Petersen et al., 2015). Dengan kata lain, pemetaan sistematis dapat dianggap sebagai

suatu cara dalam mendapatkan gambaran secara umum ruang lingkup atau bagaimana keadaan dari suatu penelitian tertentu dengan cara menggali informasi secara terperinci (Kitchenham et al., 2010). Pemetaan sistematis terutama pada SMS harus dilakukan seakurat mungkin dalam proses penelusuran dan dari sisi analisisnya sehingga dapat mencirikan proses pemilihan database, untuk membuat *search string* dan dapat ditentukan kategori eksklusi dan inklusinya (Suwandi et al., 2021).

### 3.1 Pertanyaan Penelitian

Tujuan utama studi pemetaan sistematis adalah untuk memberikan gambaran umum tentang suatu wilayah penelitian dan mengidentifikasi jumlah dan jenis penelitian serta hasil yang tersedia di dalamnya. Seringkali seseorang ingin memetakan frekuensi publikasi dari waktu ke waktu untuk melihat tren. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi forum tempat penelitian di wilayah tersebut telah dipublikasikan. Atas dasar penelusuran dari beberapa penelitian-penelitian mengenai SMS dan VOSViewer diantaranya penelitian (Fauzi et al., 2019; Purnomo, 2021; Purnomo et al., 2020; Suwandi et al., 2019) peneliti menyimpulkan beberapa pertanyaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan bibliometrik dari *Digital Governance* dalam konteks hubungannya dengan *Good Governance* secara bibliometric dengan menggunakan analisis VOSViewer?
2. Bagaimana pemetaan secara sistematis menggunakan Systematic Mapping Studier yang *Digital Governance* yang berkaitan dengan *Good Governance*?

### 3.2 Penelusuran Literatur menggunakan VOSViewer

VOSviewer adalah program yang dikembangkan untuk membangun dan melihat peta bibliometrik (van Eck & Waltman, 2010). Program ini tersedia secara gratis dan bisa diunduh secara gratis ([www.vosviewer.com](http://www.vosviewer.com)). VOSviewer dapat digunakan untuk membuat peta penulis atau jurnal berdasarkan *data co-citation* atau untuk membangun peta kata kunci berdasarkan data *co-occurrence*. Program ini memberikan visualisasi yang memungkinkan peta bibliometrik diteliti

**State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance  
Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS)  
(Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)**

---

secara terperinci. VOSviewer dapat menampilkan peta dengan berbagai cara, masing-masing menekankan aspek peta yang berbeda (van Eck & Waltman, 2010). Hal ini memiliki fungsi untuk memperbesar, menggulir, dan mencari, yang memfasilitasi pemeriksaan rinci peta. Kemampuan visualisasi pada VOSviewer sangat berguna untuk peta yang mengandung setidaknya sejumlah besar item setidaknya 100 item).

### 3.3 Penelusuran Literatur menggunakan Systematic Mapping Studies (SMS)

Tujuan dari SMS adalah menemukan sebanyak mungkin fokus-fokus utama yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dengan menggunakan strategi pencarian yang sistematis yang baik (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018). Model operator boolean digunakan untuk menggali informasi yang menghasilkan *queri* dengan berupa ekspresi yang menggunakan istilah boolean.

Artinya, istilah-istilah konteks studi digabungkan dengan operator *AND*, *OR*, dan *NOT*. Dengan menggunakan operator boolean dapat memberikan informasi dokumen yang lebih relevan dan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada *queri* teks bebas (Aliyu, 2017). String untuk melakukan penelusuran artikel menggunakan operator Boolean yang berfungsi untuk mensistesis menjadi satu string pencarian (Fauzi et al., 2019).

Dengan menggunakan operator Boolean tersebut pada tiga database jurnal elektronik diantaranya adalah Scopus, Scimedirect dan Emerald peneliti berhasil menemukan sebanyak 1864 artikel dengan menerapkan *string search* diatas untuk pencarian pada semua bagian artikel, seperti judul, abstrak, kata kunci. Proses pencarian ini dimulai pada bulan September 2020. Data hasil pencarian dan setelah dilakukan pencarian maka didapatkan hasil rincian hasil pencarian yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
Penelusuran data melalui database Scopus, Science Direct dan Emerald Insight

Sumber Database	Search String	Terdeteksi
<b>Scopus</b>	Search string “Digital Governance”	359
	Search within “Good Governance”	29
	Paper yang relevan	4
<b>Emerald Insight</b>	Search string “Digital Governance”	92
	Search within “Good Governance”	15
	Paper yang relevan	12
<b>Sage journals Journals</b>	Search string “Digital Governance”	147
	Search within “Good Governance”	22
	Paper yang relevan	13
Total paper yang relevan		31

Sumber: data diolah (2022)

Selanjutnya, ditentukan artikel dengan kriteria eksklusi dan inklusi dengan cara memisahkan artikel yang relevan atau tidak dengan tema penelitian (Petersen et al., 2015).

Pengkriteriaan ini dirumuskan agar peneliti dapat dengan mudah melihat peta secara sistematis dari penelitian yang dilakukan (Suwandi et al., 2021).

**Tabel 2**  
Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
1. Penelitian yang berfokus pada <i>“entrepreneurial intention”</i> dan <i>“knowledge acquisition”</i>	1. Penelitian yang tidak membahas <i>“entrepreneurial intention”</i> dan <i>“knowledge acquisition”</i>
2. Penelitian yang menggunakan Bahasa Inggris	2. Penelitian dengan Bahasa lain selain Bahasa Inggris
3. Hanya Artikel, dan <i>scholarly journal</i>	3. Disertasi, tesis, bagian buku, deskripsi produk, presentasi, laporan kerja, literatur perdagangan, catatan editorial, literatur yang tidak jelas
4. Penelitian yang sudah melewati peer review	4. Penelitian yang belum final atau belum melewati peer review

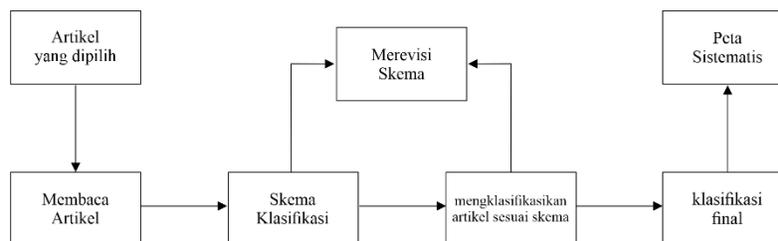
Sumber (Banaeianjahromi & Smolander, 2016; Fauzi et al., 2019)

### 3.4 Skema Klasifikasi

Penelitian ini mengadopsi proses pencarian dari hasil-hasil penelitian Petersen et al., (2015) dan (Banaeianjahromi & Smolander, 2016). Dalam proses ini, setiap langkah memiliki hasil dan peta sistematis (*systematic mapping*) yang merupakan hasil akhir dari proses pemetaan.

SMS memberikan struktur jenis laporan penelitian dan hasil yang telah dipublikasikan dengan mengkategorikannya dan sering kali memberikan ringkasan visual, peta, hasil-hasilnya (Petersen et al., 2008).

**Gambar 1**  
Proses Systematic Mapping Studies



Sumber: (Banaeianjahromi & Smolander, 2016)

Peneliti merumuskan klasifikasi penelitian pada tiga aspek pada kategori pertama

kami mengklasifikasikan penelitian berdasarkan jenis penelitian, pada kategori kedua kami



<b>Cluster 2 (Hijau)</b>	<i>Accountability, china, citizen participation, co-production, ict, information and communication, information management, information technology, internet, interoperability, local government, smart city</i>
<b>Cluster 3 (Biru)</b>	<i>Computer application, computer programming, digital government, digital platforms, digital services, digital transformation, information services, public services, systematic literature review</i>
<b>Cluster 4 (Kuning)</b>	<i>Developing countries, e-governance, e-government, framework, information and communication, information system, information use, literature reviews, websites</i>
<b>Cluster 5 (Ungu)</b>	<i>Economics, government data processing, government of india, ontology, public policy, sentiment analysis, smart cities, social media</i>
<b>Cluster 6 (Tosca)</b>	<i>Behavioral research, decision making, digital technologies, e-participation, public administration, sustainable development, united nation</i>
<b>Cluster 7 (Orange)</b>	<i>Public sector</i>

Sumber: data diolah (2022)

Pemetaan *network visualization* bertujuan mendapatkan gambaran umum mengenai suatu subjek penelitian, dan untuk menemukan bagaimana berbagai subjek yang saling berhubungan, dan menemukan peluang potensial untuk menghubungkan gap antara subjek. Kesimpulan dari peta *network visualization* diatas memperlihatkan bahwa subjek mengenai Digital Governance memiliki 7 cluster. Digital governance yang memiliki hubungan dengan smart city ada dalam satu cluster dengan pembahasan mengenai *accountability, china, citizen participation, co-production, ict, information and communication, information management, information technology, internet, interoperability, dan local government,*

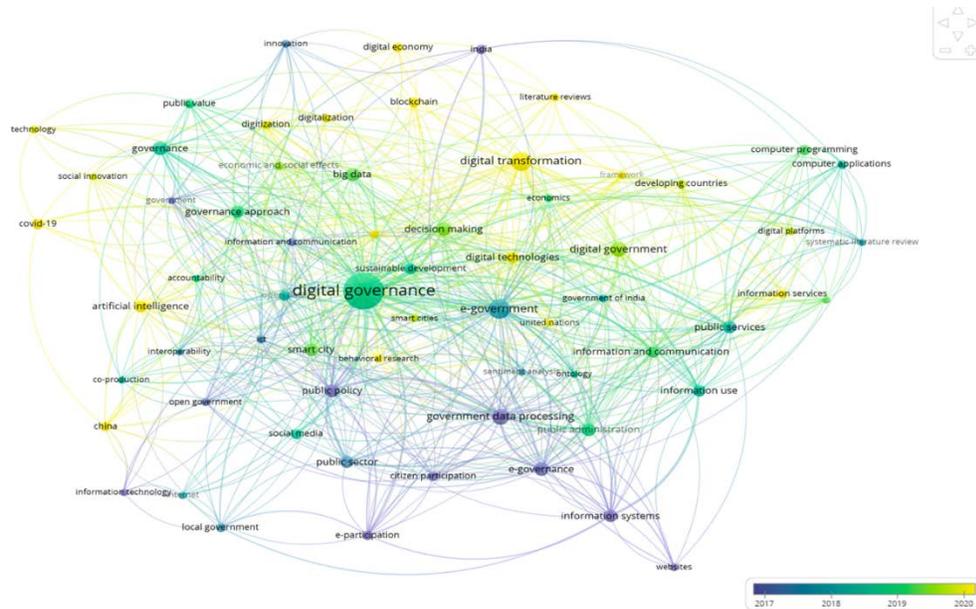
*Occurrence Digital Governance* berada pada cluster 1 dan memiliki hubungan-hubungan langsung dengan *occurrence Artificial intelegence, big data, blockchain, covid-19, digital economy, Digital Governance, digitalization, digitization, economic and social effects, governance, governance approach, government,, innovation, public value, social*

*innovation, technology, india.* Pada cluster ini hanya muncul satu *occurrence* negara yaitu negara india. Jika dilihat hubungan langsungnya dengan *Good Governance* berdasarkan pemetaan VOSViewer tidak ada *occurrence* yang muncul dengan pembahasan tersebut, maka dari itu konsep hubungan antara *Digital Governance* dan *Good Governance* berpeluang untuk menjadi *novelty* dalam sebuah penelitian.

#### 4.1.2 Pemetaan Overlay Visualization pada VOSViewer

Gambar 2 menunjukkan peta menunjukkan *state of the art* dalam penelitian tentang *Digital Governance*. Warna *overlay* masing-masing lingkaran sesuai dengan tahun publikasi rata-rata semua penelitian yang menyertakan istilah yang sesuai. Dalam peta ini, bidang penelitian dengan warna gelap (mis. Biru) mewakili aktivitas penelitian dengan tahun publikasi rata-rata yang lebih lama dan istilah dengan warna cerah (mis.kuning) menunjukkan istilah dengan tahun publikasi rata-rata yang lebih baru.

Gambar 3  
Peta Overlay Visualization Digital Governance



Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil pemetaan *overlay visualization* pada studi *Digital Governance*, dapat dilihat bahwa artikel yang membahas *Digital Governance* dengan *Smart Cities* dan memiliki warna yang mengarah pada warna cerah kuning dimana bidang tersebut muncul pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Selain itu bahasan tentang *Good Governance* sama sekali belum pernah ada yang membahas hubungannya dengan *Digital Governance*. Pembahasan *Good Governance* dalam hubungannya dengan *Digital Governance* dapat dijadikan novelty selain itu hubungan antara Digital Governance dan smart cities merupakan bahasan yang baru, dan tidak

dibahas lagi pada periode 2021-2022 sehingga hubungan dari kedua subjek tersebut berpeluang untuk menjadi *novelty* penelitian.

#### 4.1.3 Pemetaan Density Visualization VOSViewer

Gambar 4 menunjukkan peta *density visualization* menunjukkan *state of the art* dalam penelitian tentang *Entrepreneurial Intention*. Warna yang cerah (misal: Kuning) adalah warna dimana subjek penelitian adalah subjek penelitian yang sudah banyak dibahas, sedangkan warna pada subjek penelitian yang cenderung gelap transparan subjek yang belum banyak dibahas

Gambar 4  
Density Visualization Digital Governance



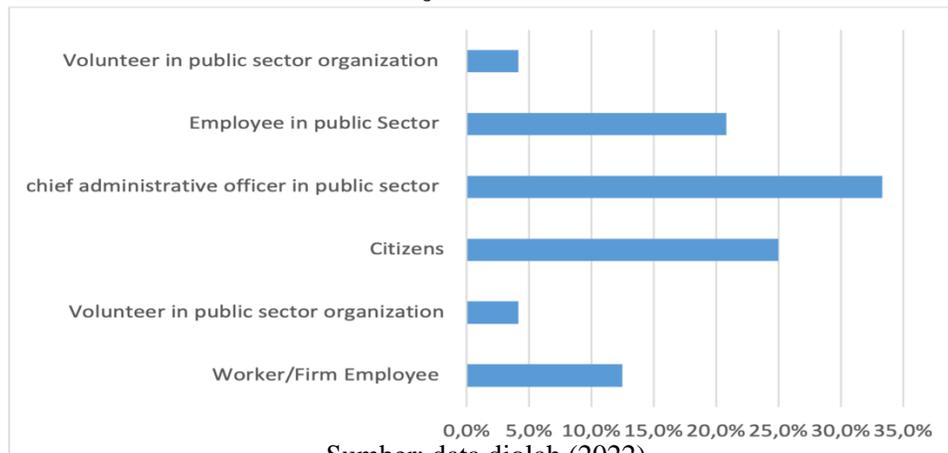
**State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance  
Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS)  
(Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)**

---

Berdasarkan hasil pengklasifikasian pada fokus penelitian dari berbagai studi pada *search string* “*Digital Governance*” dan “*Good Governance*”, pada gambar 2 dapat dilihat bahwa fokus penelitian yang paling banyak dibahas yaitu studi mengenai *e-government* dengan presentase sebesar 25,8%, sementara fokus penelitian berikutnya yang paling banyak dibahas

berturut-turut adalah studi mengenai *e-governance* dan *public service* (12,9%), *Good Governance* dan *government* (9,7%), *Digital Governance* dan *smart city* (6,5%), dan bahasan studi lainnya yaitu *bureaucracy*, *public management*, *governance*, *cyber governance* dan *public policy* sebesar 2%.

**Gambar 6  
Subjek Penelitian**



Sumber: data diolah (2022)

Definisi dari subjek penelitian yaitu seseorang atau sesuatu, atau apa saja, yang tentangnya yang dapat meliputi sifat, keadaan, atau “attribute”-nya dimana penelitian akan dilakukan (Suwandi et al., 2021). Dalam hal ini peneliti ingin meneliti attribute subjek dari penelitian mengenai *Digital Governance* dan *Good Governance*. Peneliti mengklasifikasikan pendekatan penelitian dari subjek penelitian. Berdasarkan hasil pengklasifikasian peneliti terhadap subjek penelitian dari 31 artikel studi mengenai *Digital Governance* yang dianggap ada hubungannya dengan studi *Good Governance* didapatkan didapatkan 5 subjek berdasarkan atributnya, yaitu: *worker/Firm Employee*, *volunteer in public sector organization*, *citizens*, *chief administrative officer in public sector*, *employee in public sector*. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa (gambar 3) subjek yang paling banyak diteliti dengan persentase sebanyak 33% adalah subjek *chief administrative officer in public sector*, berturut-turut diikuti subjek *citizens* (25%),

*Employee in public Sector* (20,8%), *Worker/Firm Employee* (12,6%), dan *volunteer in public sector organization* sebesar 8,3%.

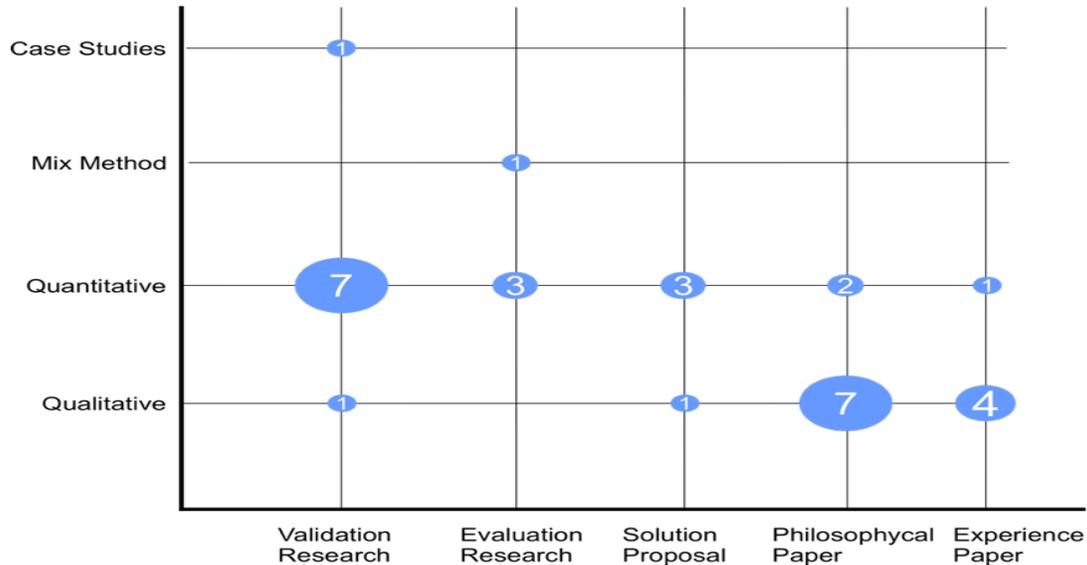
### 3.2 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Berdasarkan hasil dari pemetaan, peneliti mengelompokan jenis penelitian menjadi 5 kategori yaitu: *validation research*, *evaluation research*, *solution proposal*, *philosophical papers*, *experience paper* (Wieringa et al., 2006). Dari 31 artikel menemukan jenis penelitian yang paling banyak dilakukan adalah jenis penelitian *validation research* dan jenis penelitian *philosophical papers* yaitu masing-masing sebanyak 9 jenis penelitian. Jenis penelitian *solution proposal* dan jenis penelitian *experience paper* sebanyak masing-masing 5 penelitian. Sementara itu jenis penelitian yang paling sedikit dilakukan adalah *evaluation research* sebanyak 3 penelitian.

Selain itu peneliti mengelompokan 31 artikel tersebut berdasarkan metode penelitian, dimana pengelompokan itu dibagi menjadi 4

pengelompokan metode penelitian, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, *mix method*, dan *case study* (Musianto, 2002)

**Gambar 7**  
**Visualisasi Peta Sistematis Dua Kategori**



Sumber: data diolah (2022)

Peneliti menggunakan metode analisis yang berfokus pada penyajian frekuensi publikasi untuk setiap kategori. Hal ini memungkinkan untuk melihat kategori mana yang telah ditekankan dalam penelitian sebelumnya dan dengan demikian untuk mengidentifikasi celah dan kemungkinan untuk penelitian di masa mendatang (Petersen et al., 2008, 2015). Objek diilustrasikan menggunakan ringkasan statistik dalam bentuk tabel yang menunjukkan frekuensi publikasi di setiap kategori dalam hal ini jenis penelitian dan metode penelitian (Petersen et al., 2008). Selanjutnya dengan berpatokan pada peta sistematis dua kategori (Petersen et al., 2008) peneliti membagi sebaran dua titik jenis penelitian dan metode penelitian dalam bentuk gelembung untuk mengetahui titik persimpangan antara dua kategori tersebut. Menurut Petersen et al. (2015) Teknik ini secara lebih kuat akan memberikan gambaran umum secara singkat dari suatu bidang dan menyajikan visualisasi peta yang sistematis. Gambar 7 merupakan visualisasi dari hasil analisis dua kategori jenis penelitian dan metode penelitian.

## PEMBAHASAN

Penggunaan metode pemetaan VOSViewer secara bibliometrik menampilkan 3 tampilan pemetaan yaitu *network visualization*, *overlay visualization* dan *density visualization*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dapat dijawab pada gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Pada tampilan pemetaan pertama yaitu *network visualization* gambar 2, memperlihatkan bagaimana jaringan hubungan *occurrence* dari *search string Digital Governance* menghasilkan 7 cluster *networking*. *Occurrence Digital Governance* berada pada cluster 1 dan memiliki hubungan-hubungan langsung dengan *occurrence Artificial intelligence, big data, blockchain, covid-19, digital economy, Digital Governance, digitalization, digitization, economic and social effects, governance, governance approach, government, innovation, public value, social innovation, technology*. Pada cluster ini dapat terlihat bahwa hubungan langsung *Digital Governance* banyak berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ataupun dengan inovasi yang berhubungan dengan kebijakan

**State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance  
Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS)  
(Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)**

---

publik. Pada tampilan pemetaan kedua yaitu *overlay visualization* memperlihatkan bagaimana perkembangan dari bahasan *Digital Governance* dari tahun ke tahun yang divisualisasikan dengan warna. Berdasarkan *pemetaan overlay visualization* perkembangan penelitian pada bidang *Digital Governance* berlangsung antara periode 2017 sampai dengan periode 2020. pembahasan yang sering dilakukan pada tahun 2017 atau pembahasan terdahulu diantaranya membahas hubungan *networking Digital Governance* dengan *local government, websites, informatiion system, public policy, information technology, citizen participation, dan e-governance* dan negara India. sementara itu pembahasan terbaru pada tahun 2020 lebih banyak membahas hubungan *Digital Governance* pada *digital transformation, artificial intelegence, blockchain, digitalization, digitization, technology, covid-19, social innovatioan* dan negeri Cina. Pemetaan *density visualization* merupakan visualisasi yang menunjukkan *occurence* atau kata-kata yang paling banyak muncul pada pemetaan *Digital Governance*. Berdasarkan pemetaan *density visualization* penelitian-penelitian dengan pembahasan *e-government, smart city, government data processing, digital transformation, e-governance, dan negeri Cina* merupakan pembahasan yang banyak diteliti. sementara itu pembahasan seperti *website, accountability, digital platforms, framwork, interopability* merupakan pembahasan yang sedikit diteliti.

Sementara itu pemetaan menggunakan metode SMS, memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai studi *Digital Governance* dan keterkaitannya pada studi *Good Governance*. Peneliti-peneliti di masa depan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai dasar dan acuan untuk dijadikan penelitian lanjutan khususnya pada penelitian di bidang *Digital Governance* dan *Good Governance*. Berdasarkan pemetaan pada pada 3 database jurnal internasional yaitu scopus, emerald, dan sage journals journals, setelah dilakukan proses screening secara relevan dengan kontek studi, peneliti kembali memetakan 31 artikel tersebut dengan kategori focus penelitian, subjek

penelitian, jenis penelitian dan metode penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai fokus penelitian dan subjek penelitian pada konteks studi *Digital Governance* yang dalam hubungannya dengan *Good Governance* dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar 5 dapat disimpulkan bahwa pada penelitian dengan konteks studi *Digital Governance* fokus yang paling banyak dibahas adalah mengenai fokus penelitian *e-government* dengan jumlah sebanyak 8 fokus penelitian. Selain itu fokus penelitian fokus penelitian *e-governance* dan *public service* masing-masing sebanyak 4 penelitian. Pada gambar 6 mayoritas penelitian dilakukan pada subjek penelitian *chief administrastion officer* pada *public sector*, dan di ikuti oleh subjek penelitian *citizens* atau masyarakat pada sebuah negara atau wilayah dalam suatu negara.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dari pemetaan pada studi *Digital Governance* yang berkaitan dengan *Good Governance*. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis penelitian dengan metode SMS pada kata kunci *Digital Governance* dan *Good Governance*, mayoritas merupakan *validation research* dengan jumlah sebesar 9 penelitian. Sementara untuk metode penelitian yang banyak digunakan didominasi oleh metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sebanyak 16 penelitian atau sebesar. Pada gambar 7 peneliti mendistribusikan jenis penelitian dan metode penelitian secara sistematis (Petersen et al., 2008) untuk menemukan dimana penelitian yang belum dilakukan dalam kombinasi dari jenis penelitian dan metode penelitian. Berdasarkan visualisasi peta sistematis pada gambar 7 dapat dilihat celah-celah kosong yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya pada bahasan *entrepreneurial intention* dan *knowledge acquisition*.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi-informasi terbaru dari pembahasan mengenai studi *Digital Governance* dalam hubungannya dengan studi *Good Governance* dengan menggunakan dua teknis pemetaan yaitu *VOSViewer* dan *SMS*. Berdasarkan pemetaan *VOSViewer Digital*

*Governance* banyak berhubungan atau mempunyai networking langsung dengan pembahasan-pembahasan yang mempunyai hubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif untuk membuat kebijakan pemerintahan terbaik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari *Digital Governance* yang dikemukakan (Algazo et al., 2021; Choi & Chandler, 2020; Gao & Lee, 2017).

Terdapat keterkaitan yang kuat antara *Digital Governance* dan *E-Government* hal ini sesuai dengan pendapat Erkut (2020) dimana *E-Government* sendiri merupakan bagian dari konsep *Digital Governance*. Disisi lain ada yang menarik dari hasil pemetaan VOSViewer ini, dari hasil pemetaan tidak muncul *occurrence* atau kata-kata *Good Governance*, begitu juga dengan hasil pemetaan SMS dimana fokus penelitian yang muncul didominasi oleh fokus penelitian *E-Government*, *E-Governance* dan *public service*, padahal menurut peneliti *E-Government* ataupun *Digital Governance* dapat memperkuat atau merupakan implementasi dari *Good Governance* (Afriana et al., 2020; Ismail et al., 2020), akan tetapi hal ini dapat menjadi sebuah celah dan berpeluang dijadikan penelitian yang baru atau *novelty* dari peneliti dimasa yang akan datang.

Masih sedikitnya penelitian yang menggunakan *mix method* dan *case study* sebagai metode dalam penelitiannya pada bidang *Digital Governance* yang berkaitan dengan *Good Governance*, dimana dengan menggunakan metode tersebut dapat menambah variasi dan kebaruan dalam bahasan penelitian ini. Selain itu ada beberapa gap penelitian yang dapat di isi peneliti yang meneliti di bidang *Digital Governance* dan *Good Governance*, misalnya penelitian dengan jenis penelitian *evaluation research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif belum ada penelitian yang dilakukan, begitu pun juga jenis penelitian *validation research* dengan metode penelitian *mix method* juga belum ada peneliti yang meneliti. Jenis penelitian *evaluation research* dengan metode penelitian *case studi*, begitu pula jenis penelitian, *solution proposal*, *philosophical paper* dan *experience paper* belum pernah di teliti dengan metode penelitian *case studi* maupun *mix method*. Selain itu pada jenis penelitian *evaluation research* dengan metode penelitian kualitatif masih belum ada peneliti yang melakukan.

Berdasarkan matriks tersebut dapat dijadikan celah atau (*research gap*) untuk dijadikan *novelty* dan berkontribusi bagi penelitian terutama penelitian di bidang *Digital Governance* dan *Good Governance*.

## REFERENCE

- Afriana, W., Susetiyana, H., Maharani, O., & Azis, H. A. (2020). E-Government Effectiveness in Combating. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 28–42.
- Algazo, F. A., Ibrahim, S., & Yusoff, W. S. (2021). Digital Governance Emergence and Importance. *Journal of Information System and Technology Management*, 6(24), 18–26. <https://doi.org/10.35631/jistm.624003>
- Aliyu, M. B. (2017). American Journal of Engineering Research (AJER) 2015. *American Journal of Engineering Research (AJER)*, 6(7), 267–279.
- Banaeianjahromi, N., & Smolander, K. (2016). What do we know about the role of enterprise architecture in enterprise integration? A systematic mapping study. *Journal of Enterprise Information Management*, 29(1), 140–164.
- Bewa Dangu Wole, Anisa Purwaningsih, C. S. (2021). Analisis Kebijakan Smart City Pada Among Tani untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9344>
- Bimasakti, F. (2017). Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government Di Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3), 1–18.
- Botchway, F. N. (2001). Good Governance: the Old, the New, the Principle, and the Elements. *Florida Journal Of International Law*, 1(November), 2–40.
- Choi, T., & Chandler, S. M. (2020). Knowledge vacuum: An organizational learning dynamic of how e-government innovations fail. *Government Information Quarterly*, 37(1), 101416. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101416>
- Chung, C. S., Choi, H., & Cho, Y. (2022). Analysis of Digital Governance Transition in South Korea: Focusing on the Leadership

**State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance  
Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS)  
(Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)**

---

- of the President for Government Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1). <https://doi.org/10.3390/joitmc8010002>
- Erkut, B. (2020). From digital government to digital governance: Are we there yet? *Sustainability (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12030860>
- Fauzi, A. H., Rizal, M., & Arifianti, R. (2019). Corporate Entrepreneurship In SMEs: A Systematic Mapping Study. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21575>
- Gao, X., & Lee, J. (2017). E-government services and social media adoption: Experience of small local governments in Nebraska state. *Government Information Quarterly*, 34(4), 627–634. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.005>
- Gauld, R. (2006). E-government: what is it, and will it transform government? *Policy Quarterly*, 2(2). <https://doi.org/10.26686/pq.v2i2.4193>
- Grönlund, Å., & Horan, T. A. (2005). Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues. *Communications of the Association for Information Systems*, 15(January). <https://doi.org/10.17705/1cais.01539>
- Gurbuz, H. G., & Tekinerdogan, B. (2018). Model-based testing for software safety: a systematic mapping study. *Software Quality Journal*, 26(4), 1327–1372. <https://doi.org/10.1007/s11219-017-9386-2>
- He, Q., Wang, G., Luo, L., Shi, Q., Xie, J., & Meng, X. (2017). Mapping the managerial areas of Building Information Modeling (BIM) using scientometric analysis. *International Journal of Project Management*, 35(4), 670–685. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08.001>
- Ismail, Fathonih, A., Prabowo, H., Hartati, S., & Redjeki, F. (2020). Transparency and corruption: Does E-government effective to combat corruption? *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5396–5404. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201636>
- Kettl, D. F. (2015). The job of government: Interweaving public functions and private hands. *Public Administration Review*, 75(2), 219–229. <https://doi.org/10.1111/puar.12336>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering-A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.006>
- McBride, K. (2019). Sailing towards digitalization when it doesn't make cents? Analysing the Faroe Islands' new digital governance trajectory. *Island Studies Journal*, 14(2), 193–214. <https://doi.org/10.24043/isj.93>
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>
- Perianes-Rodriguez, A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2016). Constructing bibliometric networks: A comparison between full and fractional counting. *Journal of Informetrics*, 10(4), 1178–1195. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.10.006>
- Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE 2008*, 1–10. <https://doi.org/10.14236/ewic/ease2008.8>
- Petersen, K., Vakkalanka, S., & Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.007>
- Purnomo, M. (2021). State of The Art ‘ Entrepreneur + Sufiks ’: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis ( State of the Art of ‘ Entrepreneur + Suffixes ’: A Systematic Mapping Study ). *Sawerigading*, 27(1),

- 107–116.
- Purnomo, M., Maulana, Y. S., Sugiartana, & Tjahjono, E. (2020). State Of The Art Of Crowdfunding In Entrepreneurial Finance Context. *AdBspreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(1), 89–116.
- Rahim, A. (2019). Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(3), 133. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>
- Solihah, R., Djuyandi, Y., Witianti, S., & Herdiansah, A. G. (2017). The importance of good governance implementation in the legislative institutions. *Advanced Science Letters*, 23(5), 4820–4823. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8917>
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Suwandi, I., Raharja, S. J., & Tahir. (2021). Relationship Between Entrepreneurial Intention And Knowledge Acquisition Through The Systematic Mapping Study (SMS) Method. *JournalNX - AMultidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7(1), 187–197.
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Wieringa, R., Maiden, N., Mead, N., & Rolland, C. (2006). Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion. *Requirements Engineering*, 11(1), 102–107. <https://doi.org/10.1007/s00766-005-0021-6>

